



Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga

Anggara Setya Saputra^{1*}, Suryoto²⁾, Chamid Sutikno³⁾

^{1,2}Universitas Wijayakusuma Purwokerto

³ Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Disetujui: November 2022; Direview: Desember 2022 ; Diterima: Desember 2022

Abstrak

Stunting merupakan masalah penting bagi pemerintah yang perlu ditangani mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya mengatasi dan mengurangi *stunting* saat ini adalah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka memerangi dan menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi bottom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Kemampuan mencocokkan data menggunakan teknik pengambilan sampel menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan *stunting* Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati. Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan *stunting* merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait, organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian *stunting*. Kondisi kekurangan gizi menjadi penyebab *stunting* erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola penanganannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baik dari sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan *Stunting*

Abstract

Stunting is an important issue for the government that needs to be addressed at the local, regional and national levels. One area that has a tendency to be highly committed in efforts to overcome and reduce *stunting* at this time is Purbalingga Regency. In order to combat and reduce *stunting* rates in Purbalingga Regency. This study aims to describe how the policy implementation process is carried out in terms of rules, parties involved in the policy implementation process, policy implementing organizations and environmental analysis that affect the policy implementation process. This study tries to look at the policy implementation process from the bottom up where the role of the community and organizational groups is actively involved in implementing policies related to *stunting* prevention in Purbalingga Regency. This study uses a qualitative descriptive method with sources of informants, data triangulation techniques, and data analysis techniques. The ability to match data using sampling techniques is the main focus of this study. The research results seen from the findings of this study are based on an idealized policy scenario in which the Purbalingga Regency *stunting* prevention initiative follows the guidelines outlined in the regional regulations and the district head's decree. Communities that are the target of the *stunting* prevention program are the target group in this policy. The implementing group, especially the government group which is also part of related organizations, psychiatric community organizations, and community organizations. Social and economic aspects of the community are related to environmental factors experienced during the implementation of the *stunting* control policy. The condition of malnutrition being the cause of *stunting* is closely related to the socio-economic conditions of those who have low incomes. The implementation of the *stunting* prevention policy in Purbalingga Regency is considered successful because the management pattern focuses more on various aspects so that it can be implemented properly both in terms of policy, the parties and organizations involved and environmental factors.

Keywords: Policy Implementation, *Stunting* Prevention

How to Cite: Saputra, S.A., Suryoto & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol.10 (2): 162-170

*Corresponding author:

E-mail: anggara@unwiku.ac.id

ISSN 2549-9165 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan proses dari keberlanjutan perumusan masalah dimana masalah dirumuskan, diidentifikasi, sampai dilaksanakan. Implementasi kebijakan secara jelas terletak pada kekuasaan yang hirarkis dan terletak pada para pengambil keputusan untuk melaksanakan tujuan. Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang penting, di mana proses penempatan kebijakan diberlakukan (Imurana, et al, 2019). Keputusan yang dilaksanakan menjadi arahan bagi pemerintah yang kemudian dihadapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan secara umum merupakan penerapan aturan yang dimainkan oleh para aktor yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Aktor yang memiliki pengaruh dalam implementasi adalah secara khusus para pegawai birokrasi (Chen, 2019). Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara nampak bahwa perilaku para pelaksana dan budaya organisasi turut menentukan (Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe, 2017). Pelaksanaan implementasi menjadi salah satu tuntutan bagi para aparat pemerintah memiliki jaringan seperti para pemangku kepentingan dan kelompok lain untuk bisa bersama-sama menjalankan kebijakan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang besar ketika diterapkan atau diimplementasikan (Francois, 2019).

Pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan norma ideologi, kelembagaan, serta aktor eksternal, *stakeholders*, serta aparat harus bisa berkolaborasi dan melakukan berbagai lobi-lobi dan pendekatan untuk memastikan pelaksanaan suatu program yang diimplementasikan (Micheal, Ezugwu Chigozie. 2019). Pada tahap ini, parameter implementasi kebijakan ditetapkan secara langsung terhadap dampak faktual dari kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan (Rahmat, 2015). Dalam implementasi kebijakan, tahapan operasional menjadi salah satu hal di mana, sebenarnya kebijakan itu diterjemahkan kedalam tindakan dengan tujuan untuk memecahkan berbagai masalah umum (Makinde, Taiwo. 2017). Tahap implementasi ini secara khusus menjadi salah satu strategi dalam menjalankan suatu kebijakan dari organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dari proses sebelumnya (Sial, et.al, 2019). Pelaksanaan kebijakan atau implementasi

harus memiliki strategi manajemen dalam proses pelaksanaan program, konten dan konteks yang jelas dalam implementasi, serta prosedur yang akan dilaksanakan untuk menghindari kegagalan dari implementasi kebijakan itu sendiri (Pamer and Skjolviks, 2019).

Rencana strategi dalam implementasi kebijakan harus berupaya melihat berbagai macam kondisi dan lingkungan yang ada dalam masyarakat (Rezende, Flavio da Cunha, 2018). Upaya ini sangat perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kelompok sasaran kebijakan bisa dianalisis secara komperhensif untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan kebijakan tidak terlaksana dengan baik sebagaimana tujuan yang diharapkan (Sager and Thomann, 2019). Salah satu implementasi kebijakan yaitu terkait, kebijakan dalam penanggulangan *stunting*. Saat ini pemerintah Indonesia berupaya dalam penanggulangan masalah *stunting* dan gizi buruk yang menjadi masalah serius dan harus ditangani secara sistematis dan terstruktur dari mulai level nasional sampai dengan level desa dan kelurahan. Kondisi *stunting* di Indonesia saat ini tergolong dalam angka yang cukup tinggi mencapai 24,4 persen, hal ini masih di bawah standar WHO.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. (Sumber: <https://www.kemkes.go.id/>, 2021). Berikut tabel indeks penanganan *stunting* menurut provinsi di Indonesia.

Dari data di atas, maka dapat diketahui terkait perkembangan kondisi *stunting* di Indonesia dari kurun tahun 2018 sampai tahun 2019. Beberapa wilayah mengalami penurunan, dan beberapa wilayah mengalami kenaikan. Salah satunya adalah Propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 69,38 persen mengalami kenaikan menjadi 71,17 persen. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya penanggulangan

dan mengurangi *stunting*. Angka *stunting* di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi yaitu 15,70 persen, sehingga perlu kerja keras semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, masyarakat, praktisi dan pihak swasta (Dikutip: <https://jatengprov.go.id/>, 2022).

Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang juga memiliki komitmen dalam penanggulangan *stunting* adalah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga saat ini juga berupaya secara serius dalam penanggulangan *stunting*, dimana angka *stunting* di Kabupaten Purbalingga terbilang cukup tinggi. Berikut merupakan lokus data *stunting* di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2. Data *stunting* di Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Prev
1.	2017	28,40
2.	2018	26,40
3.	2019	17,80
4.	2020	16,93
5.	2021	15,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2017-2021.

Saat ini perkembangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun perkembangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan mulai dari sebesar 28,40 persen dan menurun sampai menjadi 15,70 persen. Angka yang sudah mendekati target prevalensi dari Presiden yaitu 14 persen. Meski demikian, angka itu masih dinilai tinggi, sehingga tetap harus diturunkan dengan kerja keras dari berbagai pihak agar bisa terus berkolaborasi dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya meningkatkan peran seluruh organisasi perangkat daerah, kelompok masyarakat, praktisi, lembaga pendidikan, dan pihak swasta untuk bersama-sama bekerjasama dan membangun sinergi dalam upaya penanganan serta penurunan *stunting* sebanyak 2,5 persen setiap tahun. Dengan demikian, secara bertahap Kabupaten Purbalingga dapat bebas dari masalah *stunting*.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif konstruktif yaitu memberikan uraian dan deskripsi secara lengkap terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting*. (B.Miles et al., 2014; Creswell &

Creswell, 2018). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penanggulangan *stunting* (Morgan, 2019). Adapun informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* dimana informan yang memiliki kapasitas dan dianggap sebagai informan kunci yang mampu memberikan informasi secara lengkap terkait dengan penanggulangan *stunting*. (Nathan & Scobell, 2019, Schneider, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman yang baik mengenai kebijakan public dapat diperoleh dengan menguraikannya menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, diantaranya yaitu: *agenda setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Laswell, 2018). Kebijakan publik menjadi salah pembahasan yang merujuk pada aktor seperti lembaga pemerintah, legislatif untuk memilih dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan dan sistem administrasi dengan pedoman aturan secara legal (Cheng and Zhang, 2019). Dimana salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini disebut sebagai tahap implemntasi kebijakan (Augustine, E Basse, Lazarus B, Abonor & Joy AE. 2020). Implementasi kebijakan merupakan keberlanjutan dari tindakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai (Philip, Dahida Deewua. 2019). Subjek dari program yang akan dilaksanakan bersifat penting, dan memiliki peran umum yang dilaksanakan melalui aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo, 2019). Implementasi menjadi model upaya untuk menciptakan suatu kebijakan yang diharapkan melalui pendekatan procedural dalam organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, diantaranya yaitu: *viability*, *theoretical integrity*, *scope*, *capacity*, dan *unintended consequences* (Schneider, 2018).

Berdasarkan berbagai kajian literature yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) variable pokok yang dianggap dapat memberikan sumbangsih atas keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan. Ke-enam variable tersebut diantaranya adalah:

- a. Tujuan dan sasaran kebijakan yang rinci dan konsisten;
- b. Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c. Proses implementasi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, demi terjaminnya kepatuhan dari para pelaksana tugas implementasi kepada para kelompok sasaran;
- d. Koomitmen dan kompetensi dari para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan dari para pemangku kepentingan;
- f. Kestabilan atas kondisi sosial, ekonomi dan politik (Sabatier, 2017).

Sementara pandangan Smith (1973) mengenai proses pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan empat aspek:

1. Kebijakan yang Diidealkan: Aspek kebijakan yang diidealkan merujuk pada upaya memperhatikan sasaran kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.
2. Organisasi Pelaksana kebijakan: Aspek organisasi pelaksana kebijakan memiliki tujuan agar kebijakan dikelola dengan baik oleh para implementator, dalam hal ini birokrasi pemerintahan.
3. Lingkungan Kebijakan: Aspek lingkungan kebijakan bisa dilihat dari lingkungan sosial, lingkungan geografis dan lingkungan budaya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Berikut Gambar kerangka implementasi kebijakan

Sebagai suatu sarana untuk mendalami permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) aspek implementasi menurut Smith, diantaranya adalah *Idealized Policy*, *Implementing Organization*, dan *Environmental factors*.

Kebijakan publik menjadi salah pembahasan yang merujuk pada aktor seperti lembaga pemerintah, legislatif untuk memilih dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan dan sistem

administrasi dengan pedoman aturan secara legal (Cheng and Zhang, 2019). Dimana salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini disebut sebagai tahap implemntasi kebijakan (Babatunde, Binoyo. 2019). Implementasi kebijakan merupakan keberlanjutan dari tindakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai. Subjek dari program yang akan dilaksanakan bersifat penting, dan memiliki peran umum yang dilaksanakan melalui aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo, 2019). Implemntasi merupakan upaya mencakup aspek yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan publik. (Savard, 2019)

Kebijakan Penanggulangan *Stunting*

Percepatan perbaikan gizi membutuhkan aksi global di semua negara yang memiliki masalah stunting, bukan hanya Indonesia. Majelis Kesehatan Dunia (WHA) 2019 meluncurkan inisiatif ini. Tujuan berikut telah ditetapkan dalam upaya untuk mengurangi stunting: menurunkan prevalensi bayi berat lahir rendah; menurunkan prevalensi stunting; menurunkan prevalensi wasting; dan menurunkan prevalensi kelebihan berat badan pada anak di bawah usia lima tahun. Rendah (BBLR), meningkatkan persentase ibu yang menyusui secara eksklusif. Sebagai negara anggota PBB dengan prevalensi stunting yang tinggi, pihaknya juga berupaya dan berkomitmen untuk percepatan gizi masyarakat melalui Scaling Up Nutrition (SUN). Pembangunan pangan dan peningkatan gizi dilakukan secara lintas sektor, meliputi produksi, pengolahan, peredaran, dan konsumsi pangan dengan gizi yang cukup, seimbang, dan terjamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang berkaitan dengan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan (RPJP). keamanan. Arah gizi menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, serta akses dan kualitas gizi. pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbaikan

sistem f. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang menetapkan kebijakan di bidang pangan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, lahir sesuai dengan kedua undang-undang tersebut. Setiap lima (lima) tahun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat rencana aksi pangan dan gizi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, yang mengatur tentang penciptaan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berdaya saing dalam pembangunan pangan dan gizi, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) harus dibuat. Selain itu, Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat membantu memajukan pengetahuan gizi seimbang, meningkatkan akses pangan sehat, dan mempercepat kemajuan gizi. Melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan kebijakan bertajuk Penanggulangan Stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik yang akan dilaksanakan oleh bidang kesehatan dengan target 1.000 anak HPK, dan Intervensi Gizi Sensitif yang akan dilaksanakan oleh semua sektor kesehatan dan akan menysasar seluruh masyarakat.

Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan standar sumber daya manusianya. Pendekatan yang akan digunakan salah satunya adalah kemandirian keluarga, gerakan masyarakat untuk hidup sehat, dan penguatan gerakan seribu hari pertama kehidupan. Ini juga mencakup pendidikan, pelatihan, dan konseling tentang kesehatan dan gizi. Sasaran upaya perbaikan gizi adalah mempertahankan dan meningkatkan status gizi masyarakat melalui kegiatan yang terpadu, berkesinambungan, dan terpadu. Kolaborasi antara sektor kesehatan dan non-kesehatan diperlukan untuk menekan jumlah kasus stunting. Kerjasama ini harus berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup pencapaian ketahanan pangan dan SDG ke-2 memberantas kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030 adalah stunting. Pada tahun 2025, diharapkan dapat menurunkan angka stunting sebesar 40%. Stunting telah ditetapkan sebagai salah

satu prioritas utama pemerintah untuk mencapai hal ini. berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016.

Idealized policy

Idealized policy merupakan pendekatan yang berupaya membangun suatu kesamaan dari kebijakan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Padahal dalam suatu organisasi, efektivitas komunikasi dari seorang pemimpin berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai atau karyawan di bawahnya (Vadeveloo *et al*, 2017). Pada aspek kebijakan yang ideal atau yang diharapkan memiliki fungsi utama yaitu penyesuaian kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil yang akan dicapai. Seperti halnya implementasi kebijakan dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga menjadi agenda pemerintah untuk bisa diimplementasikan dengan baik. Dari hasil penelitian terkait dengan kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga, pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan yang merujuk pada hal tersebut diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
2. Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2023.

Kebijakan yang ideal dalam penanggulangan *stunting* akan memiliki dampak secara langsung terhadap model dan desain kelembagaan pemerintah. Desain kelembagaan pemerintah menjadi faktor penentu dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam organisasi. Desain kelembagaan ini berupaya untuk menentukan sejauh mana keterbukaan lembaga atas berbagai masukan dan informasi yang di jadikan rujukan dalam penanganan masalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa desain kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan sangat terbuka. Lembaga yang terlibat dalam penanggulangan *stunting* terus melakukan komunikasi dan koordinasi lintas *stakeholders* untuk bisa secara bersama-sama mengupdate informasi dan perkembangan *stunting*. Selanjutnya, dalam pengaturan

daerah dan peraturan bupati terlihat desain kelembagaan pemerintah membuat jalur koordinasi dari mulai level pemerintah desa kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Purbalingga secara terstruktur dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam melakukan pemetaan dan pengalihan informasi untuk mengetahui sejauhmana perkembangan penurunan *stunting* baik di wilayah desa maupun di wilayah perkotaan.

Target groups

Dalam studi implementasi kebijakan publik tentunya tidak bisa dilepaskan dari aspek *target group* (kelompok sasaran) hal ini akan mendorong upaya keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi subjek kebijakan yang kemudian mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan atas suatu implementasi kebijakan. Kompetensi sendiri dimaknai sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu tugasnya dengan benar dan memiliki kelebihan yang didasarkan atas berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron *et al*, 2019). Dalam konteks implementasi kelompok sasaran bukan hanya sekedar subjek tetapi menjadi pihak yang juga mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satriadi (2018) menyatakan bahwa salah satu unsur *core value* dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi syarat dan ketentuan yang harus dijalankan, pernyataan tersebut bermakna bahwa kelompok sasaran semakin tinggi dalam ikut serta dalam partisipasi secara aktif dalam proses implementasi kebijakan. Seperti halnya didukung penelitian Kusumaningsih dkk (2022) yang menyatakan bahwa kemitraan entitas pemerintah desa, organisasi desa, dan keterlibatan masyarakat merupakan kelompok sasaran yang memungkinkan bagi masyarakat yang terkena dampak.

Dalam proses implementasi kebijakan penurunan *stunting* tentunya tidak bisa lepas dari pengaturan kelompok sasaran dan *stakeholders* yang terlibat baik dari kelembagaan pemerintah maupun masyarakat

dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Kelompok sasaran dalam kebijakan penanggulangan *stunting* adalah mereka yang masuk dalam data pembinas kesehatan (kelompok masyarakat gangguan terhadap pertumbuhan anak) dan kelompok keluarga yang memiliki balita dengan kondisi gizi buruk. Dari hasil penelitian ini juga pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat secara terstruktur mengembangkan program tanggap *stunting* dari mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Selain itu hampir sebagaimana besar masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam penanggulangan *stunting* adalah masyarakat yang berda dalam kondisi kemiskinan dengan penghasilan rendah.

Dengan adanya kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga ini pemerintah berupaya menjalankan program-program kegiatan yang bukan hanya pada aspek kesehatan saja melainkann juga upaya pengentasan kemiskinan secara bertahap. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi awal permasalahan *stunting* dipicu oleh kondisi kekurangan gizi oleh anak atau balita yang menyebabkan gangguan pada pertumbuhan badan. Kondisi kekurangan gizi ini juga tidak lepas dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga langkah pertama pemerintah adalah memetakan penyebab *stunting* secara komperhensif dengan mengumpulkan data masyarakat melalui kelompok posyadu dan praktisi kesehatan. Artinya, penyebab *stunting* ini harus di selesaikan dari dua aspek masalah pangan dan masalah kemiskinan.

Implementing organization

Model organisasi yang melaksanakan kebijakan harus mampu mengembangkan pendekatan yang relevan dan bisa dipahami oleh setiap kelompok sasaran, hal ini bertujuan agar tingkat keberhasilan kebijakan mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak baik pelaksana maupun penerima program. Dalam konteks implementasi kebijakan peran organisasi pelaksana sangat penting yang mana harus mampu menerjemahkan kebijakan secara detail dan mengeksplorasi berbagai

macam alternative untuk mencapai kepentingan publik. Penelitian Mamuri dkk (2022) menyatakan bahwa Strategi implementasi kebijakan dan manajemen organisasi menjadi landasan kesimpulan studi ini. Menimbang penyelenggaraan BUMDes baik dari sisi kebijakan, target khalayak, dan kondisi lingkungan, serta pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif kebijakan, bahwa pihak atau yang juga bisa disebut dengan aktor berasal dari berbagai lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik. Hal ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah kebijakan. Interaksi kekuasaan dalam arah kebijakan menunjukkan arah kemana suatu keputusan akan dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berwibawa merupakan hasil dari serangkaian keputusan sistematis yang dibuat oleh aktor-aktor yang berkuasa atau berpengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Keterkaitan antara kedua makna tersebut dengan demikian dapat dipahami berasal dari gagasan kekuasaan dan kebijakan, yang merupakan hasil interaksi kekuasaan antara pemangku kepentingan.

Dari hasil penelitian, mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Purbalingga tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai pihak yang terlibat. Hal penelitian tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Robbins dan Judge, 2017), bahwa keterlibatan kerja dimaknai sebagai suatu kondisi dimana tingkat seseorang menyatukan dirinya ke dalam suatu pekerjaan dan secara aktif turut berkontribusi dalam program percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga.

Environmental factors

Aspek lingkungan menjadi faktor dan penentu kebijakan yang akan dilaksanakan hal ini, dikarenakan organisasi pelaksana kebijakan tidak bisa menjalankan kebijakan tanpa dukungan penuh dari lingkungan yang ada untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Lingkungan dalam perspektif kebijakan menjadi salah satu upaya yang harus dikembangkan dengan pendekatan budaya dan sosial masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan tidak bertentangan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* tidak lepas dari faktor lingkungan

sosial dan lingkungan ekonomi. Saat ini di Kabupaten Purbalingga fokus pemerintah dalam penanggulangan *stunting* bukan hanya pada kebijakan secara kesehatan, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. Faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi salah satu faktor masyarakat dengan penghasilan rendah tidak mampu sepenuhnya dalam mencukupi kebutuhan hidup, termasuk dalam kecukupan makanan yang bergizi.

Lingkungan sosial masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah juga menjadi faktor dimana kondisi *stunting* yang ada tidak ditanggapi secara serius. Saat ini pemerintah berupaya mengembangkan model penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga selain dengan pemberian bantuan pangan sehat bagi masyarakat miskin juga berupaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat secara bertahap berdaya dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan. Artinya, dari hasil penelitian ini dapat diketahui terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* juga ditentukan oleh faktor lingkungan yang juga harus mendukung. Selain itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga dalam penanggulangan *stunting* dilakukan secara komperhensif, bukan hanya pada pemberian bantuan pangan bergizi bagi anak tetapi juga mulai memberdayakan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* ini menjadi acuan dan role model yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Saputra dan Suryoto (2022) yang menyatakan bahwa program pencegahan *stunting* dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga dapat diketahui dari sisi aspek kebijakan sudah ada dan sudah dilaksanakan dengan baik, sedangkan dari sisi pihak yang terlibat pemerintah daerah mencoba melibatkan dan mengkolaborasikan dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait untuk bisa bersinergi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten

Purbalingga. Selain dari organisasi perangkat daerah, pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting juga terdiri dari organisasi masyarakat kelompok posyandu di masing-masing kelurahan dan desa yang sudah terintegrasi dan terkoneksi dengan dinas kesehatan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan juga tidak lepas dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang lemah termasuk masalah kemiskinan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan angka stunting. Impelementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga juga mencoba mengkolaboarsikan program kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2017). *Public policymaking: an introduction. In Public policymaking: an introduction.* <http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>
- Anderson, (2017). *Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin Company, pp. 1 – 34.* (Chapter 1 The Study of Public Policy).
- Arizzo. (2019). *Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review.*Tennessee State University Department of Public Administration.
- Ashworth, R. E., McDermott, A. M., & Currie.. (2019.) *Theorizing from Qualitative Research in Public Administration: Plurality through a Combination of Rigor and Richness.* Journal of Public Administration Research and Theory, 29(2).
- Augustine,et.al. (2020). *“The Impact of Female Genital Mutilation (FGM) on Hemorrhage During Child Birth Among Rural Women of Cross River State”*, Information and Knowledge Management, Vol 7, No.11,Pp 1 – 13.
- Babatunde, Binoyo. (2019).*“Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria.”* Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter), Vol 4, No 1,Pp 26 -37.
- B.Miles, M., Huberman, & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles,*
- A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In Sage Publications.
- Chen, Jiajian and Zhang, Qiongwen. (2019). *Fluctuating policy implementation and problems in grassroots governance.* Social Work Development Research Center, Southwestern University Wenjiang District, China, The Journal of Chinese Sociology.
- Creswell, & Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
- Francois, Benoit. (2019). *Public Policy Models and Their Usefulness in Public Health: The Stages Model.* Montréal, Québec: National.
- Imurana, Braimah Awaisu et.al. (2019). *The Politics of Public Policy and Problems of Implementation in Africa: An Appraisal of Ghana’s National Health Insurance Scheme in Ga East District.* International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 4, Special Issue. Department of Political Science University of Ghana Legon.
- Kusumaningsih, Oti., Anggara Setya Saputra., Chamid Sutikno., Mujib. (2022). *Implementation Of The Jogo Tonggo Program In Karangnangka Village, Kedungbanteng District Kabupaten Banyumas.* Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.12 No. 02, 227 – 234.
- Lane, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). *Non-profit organizations in public policy implementation. Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
- Micheal, Ezugwu Chigozie. (2019). *Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience.* J. Soc. Sci, 11(1): 63-69 (2005) Department of Public Administration, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria.
- Micheal, Ezugwu Chigozie. (2019). *Policy Implementation and National Developpment: A Study of Japan and Nigeria Railway Policies.* Hokaido University. Dikutip,dari:<http://www.academia.edu/1211258/Policy,Implementation>.diakses Pada Hari Minggu Tanggal 13 November, 18.09.
- Morgan, D. L. (2017). *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic*

- Approach.
- Mota, Daniela Belchior and Ronzani, Telmo Mota, (2019). *Implementation of public policy on alcohol and other drugs in Brazilian municipalities: comparative studies. Health and Social Care in the Community*, 24(4), 507–518. Department of Psychology, Federal University of Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2019). *Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life*. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- Ospina, S. M., Esteve, M., & Lee, S. (2018). *Assessing Qualitative Studies in Public Administration Research*. *Public Administration Review*, 78(4), 593–605. <https://doi.org/10.1111/puar.12837>
- Pemer, Frida and Tale Skjolsvik. (2019). *Adopt or Adapt? Unpacking the Role of Institutional Work Processes in the Implementation of New Regulations*. *Journal of Public Administration Research And Theory*, 2018, 138–154 doi:10.1093/jopart/mux020.
- Philip, Dahida Deewua. (2019). *Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus. Public Policy and Administration Research*. Vol.3, No.6. Department of Public, Administration, University of Abuja, P.M.B 117 Abuja-Nigeria.
- Rahmat, Afifa. (2019). *Policy Implementation: Process and Problems. International Journal of Social Science and Humanities Research* ISSN 2348-3164, Vol. 3, Issue 3, pp: (306-311), Aligarh Muslim University.
- Rezende, Flavio da Cunha. (2018). *The Implementation Problem Of New Public Management Reforms: The Dilemma Of Control And The Theory Of Sequential Failure*. *International Public Management Review, electronic Journal*, Volume 9, Issue 2, 2008. Federal University of Pernambuco, Brazil.
- Sager, Fritz and Thomann. (2019). *Multiple streams in member state implementation: politics, problem construction and policy paths in Swiss asylum policy*. *Journal of Public Policy*, 37:3, 287–314. Cambridge University Press.
- Saputra, Anggara Setya., Suryoto. (2022). *Implementation Of Stunting Prevention Policy In Banyumas Regency*. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 03, 373 – 384.
- Savard, Jean Francois. *With the collaboration of R. Banville 2019. "Policy Cycles," in L Administration..* Cote and J.-F. Savard (eds.), *Encyclopedic Dictionary of Public*.
- Schneider, B. (2018). *Review of Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life*. In *European Psychologist* (Vol. 13, Issue 2, pp. 152–153). <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=psyc&AN=2008-06444-007>
- Kemenkes RI. (2018a). *Buletin Stunting. Kementerian Kesehatan RI, 1, 2*.
- Kemenkes RI. (2018b). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat r Jenderal. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun*, p. 248. <https://doi.org/351.077>.